

Pendapatan Nasional Dalam Perspektif Ekonomi Islam

**Asyari Hasan, Alim Saparuddin Harahap, Maulida Tsaqifa Az-Zahra, Rahmawati,
Muhamad Ibrahim, Annisa Amalia Zahra**

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Email: asyarihasan01@gmail.com, alim.saparuddin21@mhs.uinjkt.ac.id,
maulida.tsaqifa21@mhs.uinjkt.ac.id, rahma.wati21@mhs.uinjkt.ac.id,
muhamad.ibrahim21@mhs.uinjkt.ac.id, annisaamalia.zahra21@mhs.uinjkt.ac.id

ABSTRAK

Pemahaman tentang pendapatan nasional baik dalam ekonomi konvensional maupun Islam ditelaah secara rinci dalam penelitian ini. Kajian ini bertujuan untuk memahami pengertian pendapatan nasional, perspektif ekonomi Islam terhadap pendekatan nasional, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pendekatan nasional. Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik penelitian kepustakaan dan penalaran yang menentukan dari pembuatnya. Kajian pustaka dan beberapa karya terkait yang terkait dengan topik utama pembahasan menjadi dasar pembahasan dalam penelitian ini. Menurut temuan penelitian ini, pendapatan nasional suatu negara adalah jumlah total yang diterima masyarakat di suatu negara dalam satu tahun. Gaji publik juga dapat diperkirakan menggunakan petunjuk seperti PDB (Produk domestik bruto) atau Gaji Publik Bruto (GNI), yang mengukur nilai semua tenaga kerja dan produk yang dibuat di dalam batas suatu negara atau oleh penduduk suatu negara. Dari sudut pandang ekonomi Islam, ghanimah, zakat, sedekah, infaq, ushr, jizyah, kharaj, pajak pertambangan, dan wakaf merupakan sumber pendapatan nasional. Faktor-faktor yang memengaruhi gaji mencakup bunga dan penawaran total, pemanfaatan dan dana cadangan, dan investasi.

Kata Kunci: Pendapatan Nasional, Ekonomi Islam, GDP

ABSTRACT

The understanding of national income in both conventional and Islamic economics is examined in detail in this study. This study aims to comprehend the definition of national income, Islamic economics' perspective on the national approach, and the factors that influence the national approach. The strategy utilized in this examination is a library of research techniques and decisive reasoning from the creator. The literature review and a number of pertinent works related to the main topic of discussion serve as the basis for the discussion in this study. According to the findings of this study, a nation's national income is the total amount a community in a country receives in a single year. Public pay can likewise be estimated utilizing pointers like GDP (Gross domestic product) or Gross Public Pay (GNI), which measure the worth of all labor and products created within the limits of a nation or by residents of a country. From the point of view of Islamic economics, ghanimah, zakat, alms, infaq, ushr, jizyah, kharaj, mining taxes and waqf are all sources of national income. Factors that impact pay incorporate total interest and supply, utilization and reserve funds, and venture.

Keywords: National Income, Islamic Economic, GDP

DASAR PEMIKIRAN

Menurut Natadipurba (2016), kehidupan umat Islam dibenamkan dalam Islam secara keseluruhan, sehingga ekonomi Islam bukanlah turunan dari kegiatan ekonomi melainkan dari Islam (Natadipurba). Masalah keuangan Islam tidak dapat dipisahkan dari fondasi sejarah kenabian dan mengaitkannya dengan latar belakang sejarah umat manusia secara keseluruhan. Menurut Suma (2008), kebijakan ekonomi Islam didasarkan pada konsep keadilan dan pemerataan yang diturunkan dari Nabi Muhammad SAW. Negara harus menerapkan kebijakan berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan ijma' untuk mencapai kebahagiaan sekarang dan di masa depan (Karim, 2008).

Salah satu indikator terpenting dari situasi ekonomi makro adalah pertumbuhan dan pendapatan perekonomian nasional. Secara teoritis, dapat dikatakan bahwa pendapatan nasional total dan per kapita suatu negara meningkat dengan perkembangan ekonominya (dengan asumsi tingkat pertumbuhan lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan penduduk). Ada beberapa definisi pendapatan nasional. Istilah "Produk Nasional Bruto" (GNP) dan "Produk Domestik Bruto" (PDB) keduanya dapat digunakan untuk menggambarkan "pendapatan nasional", atau Pendapatan Nasional (NI), yang semuanya merupakan istilah yang berbeda untuk hal yang sama. Selain ketiga konsep di atas, konsep tambahan digunakan setiap tahun untuk menilai kinerja ekonomi suatu negara. Jika pendapatan per kapita cenderung naik dari waktu ke waktu, ekonomi dikatakan berkembang.

Secara umum pendapatan nasional ini merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kebaikan masyarakat secara keseluruhan dan bagi setiap kelompok masyarakat. Sebagai contoh, sebagai petani, mereka tertarik dan sangat terpengaruh oleh perubahan pendapatan nasional. Misalnya, jika pendapatan nasional turun, harga barang-barang pertanian juga akan turun. Demikian pula, dampaknya terhadap pekerjaan dan peluang bisnis terbuka, dengan asumsi penciptaan publik berkurang/gaji publik berkurang, itu akan menyebabkan berkurangnya potensi bisnis membuka pintu dan meningkatkan pengangguran. Jika produk nasional dan pendapatan nasional turun, sejumlah masalah ekonomi akan muncul. Oleh karena itu tujuan atau sasaran pembangunan yang paling mendasar untuk mengatasi timbulnya berbagai persoalan ekonomi dan kebangsaan adalah upaya peningkatan berbagai kegiatan ekonomi dan upaya ekonomi untuk meningkatkan pendapatan nasional. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui definisi pendapatan nasional, bagaimana perspektif pendekatan nasional dalam ekonomi Islam serta faktor yang mempengaruhi pendekatan nasional.

METODE

Metode penelitian kepustakaan (*literature review*) dan pemikiran kritis penulis digunakan dalam penelitian ini. Menurut Mestika Zed (2014) dalam bukunya "*Library Research*" studi pustaka merupakan jenis penelitian yang memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber data. Tanpa perlu kerja lapangan, penelitian kepustakaan hanya sebatas bahan pustaka saja. Oleh karena itu, pembahasan dalam penelitian ini didasarkan pada penelitian literatur dan beberapa tulisan yang relevan dengan pokok pembahasan. Dalam hal ini tulisan yang dimaksud adalah kumpulan lima belas jurnal antara lain tujuh jurnal dari Bahasa lain dan delapan jurnal dari jurnal Bahasa Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu dilakukan dengan cara pengambilan data dari berbagai buku dan jurnal ilmiah terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun tujuan dari

penelitian ini yaitu untuk menjelaskan pendapatan nasional di Indonesia dengan fokus pada pendekatan ekonomi islam, yang disajikan sesuai dengan sumber-sumber data yang diteliti.

PEMBAHASAN

Pengertian Pendapatan Nasional

Jumlah dari semua pendapatan penduduk suatu negara selama satu tahun dikenal sebagai pendapatan nasionalnya. Ini termasuk pendapatan campuran, upah, keuntungan, bunga, sewa, dan sumber pendapatan lainnya. Ketika mencoba memperkirakan pendapatan nasional negaranya pada tahun 1665, orang Inggris Sir William Petty pertama kali mengusulkan gagasan ini. Ekonom modern, di sisi lain, tidak setuju dengan sudut pandang ini karena mereka percaya bahwa output barang atau jasa tahunan suatu negara adalah indikator utama aktivitas ekonomi.

Menurut (Suleman dkk. 2020) "pendapatan nasional" adalah jumlah uang yang dihasilkan suatu negara pada tahun tertentu. Menurut (Yanto 2003), pendapatan nasional adalah ukuran nilai output suatu negara berupa barang dan jasa yang dihasilkan selama periode waktu tertentu. Gaji publik juga dapat diperkirakan menggunakan petunjuk seperti PDB (Produk domestik bruto) atau Gaji Publik Bruto (GNP), yang mengukur nilai semua tenaga kerja dan produk yang dibuat di dalam garis suatu negara atau oleh penduduk suatu negara, termasuk di luar negeri dalam satu rentang waktu tertentu. Dengan menghitung ini dapat memberikan garis besar tingkat keuangan yang telah dicapai dan nilai hasil yang dihasilkan, pengaturan konsumsi total, komitmen berbagai bidang keuangan, dan tingkat keberhasilan yang dicapai.

Menurut Sadono Sukirno, upah publik adalah berapa banyak upah yang diperoleh oleh variabel-variabel penciptaan yang digunakan untuk menghasilkan tenaga kerja dan produk pada tahun tertentu. Akibatnya, konsep pendapatan nasional adalah pengukuran berbasis unit dari total nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam satu tahun.

Selain itu, data pendapatan nasional yang telah diperoleh dapat digunakan untuk membuat ramalan tentang perekonomian negara di masa yang akan datang. Menurut Sukirno (2008), para pelaku bisnis dapat menggunakan prediksi ini untuk merencanakan kegiatan ekonomi mereka di masa depan dan menyusun strategi ekonomi untuk pembangunan negara. Selain itu, faktor-faktor seperti konsumsi, tabungan, investasi, dan permintaan dan penawaran agregat biasanya berdampak pada pendapatan nasional. Ada tiga metode untuk menghitung pendapatan negara:

1. Pendekatan pendapatan, yaitu suatu cara untuk menghitung nilai seluruh pendapatan yang diterima oleh rumah tangga dalam suatu negara selama satu periode tertentu, termasuk pendapatan dari upah, sewa, bunga, dan laba, sebagai imbalan atas faktor-faktor produksi yang diberikan pada perusahaan.
2. Pendekatan produksi, Adalah suatu cara untuk menghitung nilai seluruh produk yang dihasilkan oleh suatu negara dari sektor industri, pertanian, pertambangan, jasa, dan perdagangan selama satu periode tertentu. Nilai produk yang dihitung dalam pendekatan ini adalah nilai dari barang dan jasa jadi, bukan dari bahan mentah atau barang setengah jadi.
3. Pendekatan pengeluaran: Merupakan metode untuk menghitung jumlah pengeluaran agregat untuk membeli tenaga kerja dan produk yang dikirim di suatu negara selama

periode tertentu. Biaya yang dikeluarkan oleh empat pelaku ekonomi yaitu rumah tangga, pemerintah, investasi, dan selisih nilai ekspor dan impor digunakan untuk menghitung.

Susunan GNP

Menurut Winardi (1983), susunan GNP sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya:

1. Struktur Ekonomi: Setiap negara memiliki struktur ekonomi yang berbeda dalam meningkatkan GNP-nya. Beberapa negara masih bergantung pada sektor tertentu seperti sektor pertanian, industri, atau jasa, namun banyak negara yang mengkombinasikan struktur ekonominya untuk meningkatkan GNP.
2. Kebutuhan: Perekonomian suatu negara menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk kepentingan bangsa atau rakyatnya, kecuali untuk kegiatan ekspor-impor.
3. Pembentukan Modal: Tabungan pemerintah sangat berperan dalam menentukan masa depan suatu negara, karena semakin besar tabungan suatu negara maka semakin besar produksi barang modalnya. Oleh karena itu, setiap negara akan berusaha meningkatkan tabungannya untuk memperbesar barang-barang modalnya.

Dengan demikian, dimungkinkan untuk merumuskan atau menegaskan dari berbagai definisi GNP bahwa:

- a. Jumlah semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri (domestik) dan pendapatan bersih luar negeri adalah Pendapatan Nasional Bruto.
- b. Pendapatan Nasional Bersih adalah penyusutan tahunan semua barang modal tetap yang digunakan dalam produksi dibagi dengan total produk nasional bruto.

Faktor yang mempengaruhi GNP

Menurut Winardi (1983), perbedaan GNP antara satu negara dengan negara lainnya dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya:

1. Faktor geografis dan lingkungan alamiah, seperti ukuran wilayah, kondisi iklim, sumber daya alam, dan topografi wilayah.
2. Faktor demografi, seperti jumlah dan struktur penduduk, tingkat urbanisasi, dan tingkat migrasi.
3. Faktor ekonomi, seperti sektor ekonomi yang dominan, tingkat industrialisasi, tingkat produktivitas tenaga kerja, dan ketersediaan modal dan teknologi.
4. Faktor politik dan sosial, seperti stabilitas politik, kebijakan pemerintah terkait ekonomi, tingkat korupsi, dan tingkat keamanan nasional.
5. Faktor historis, seperti warisan budaya dan kebiasaan, sejarah kolonialisme, dan hubungan internasional.

Kondisi ekonomi suatu negara serta variasi GNP per kapita antar negara dapat dipengaruhi oleh interaksi dari semua faktor tersebut. Namun, meskipun suatu negara memiliki GNP yang besar, GNP per kapitanya akan rendah jika negara tersebut juga memiliki populasi yang besar. Hal ini berkaitan dengan pernyataan Winardi dan kasus-kasus yang dihadapi

Indonesia antara tahun 1973 dan 1980. Karena jumlah penduduk Indonesia yang besar, meskipun PDB Indonesia lebih tinggi dari negara-negara ASEAN lainnya bahkan beberapa negara Asia, PDB per kapita Indonesia tetap rendah atau lebih rendah dari negara-negara ASEAN dan negara-negara Asia.

Jenis-Jenis Pendapatan Nasional

1. PDB/GDP (Produk Domestik Bruto/*Gross Domestic Bruto*)

Jumlah nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh unit-unit produksi dalam wilayah suatu negara selama satu tahun merupakan Produk Domestik Bruto. Perkiraan tersebut juga mencakup item dan layanan yang dibuat oleh organisasi asing atau orang yang bekerja di sekitar.

Rumus berikut dapat digunakan untuk menentukan konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor, dan impor suatu negara:

$$\mathbf{GNP (Y) = C + I + G + (X - M)} \quad \rightarrow(1)$$

Dimana:

Konsumsi Masyarakat (C)

Investasi (I)

Konsumsi Pemerintah (G)

Ekspor (X)

Impor (M)

$$\mathbf{PDB = C + I + G + (X - M)}$$

$$\mathbf{PDB = 200T + 100T + 400T + (120T - 300T)}$$

$$\mathbf{PDB = 520T}$$

2. PNN/NNP (Produk Nasional Netto/*Net National Product*)

NNP adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara dalam periode tertentu, setelah dikurangi penyusutan atau depresiasi serta barang pengganti modal.

$$\text{Rumus: } \mathbf{NNP = GNP - Penyusutan} \quad \rightarrow(2)$$

Contoh: Penyusutan alat di perusahaan A sebesar Rp12.500, maka jumlah NNP adalah:

$$\mathbf{NNP = 6.970.000 - 12.500 = 6.957.500}$$

3. NNI/Pendapatan Nasional (*Net National Income*)

NNI adalah total pendapatan yang diterima oleh penduduk suatu negara setelah dikurangi pajak tidak langsung (indirect tax).

$$\text{Rumus: } \mathbf{NNI = NNP - Pajak tidak langsung + subsidi} \quad \rightarrow(3)$$

Contoh: Pajak penjualan barang sebesar Rp140.000 dan subsidi sebesar Rp30.000, maka jumlah NNI adalah:

$$\mathbf{NII = 6.957.500 - 140.000 + 30.000 = 6.847.500}$$

4. PI/Pendapatan Personal (*Personal Income*)

PI adalah total pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat setelah dikurangi oleh laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, pajak perseorangan, dan ditambah dengan transfer payment.

Rumus: $PI = (NNI + \text{pembayaran transfer}) - (\text{iuran sosial} + \text{asuransi} + \text{laba ditahan} + \text{pajak perseroan})$ →(4)

Contoh: Transfer Payment sebesar Rp30.000, pajak perseroan Rp28.000, laba ditahan Rp42.700, iuran pension Rp25.800, asuransi sebesar Rp50.000, maka jumlah PI adalah

$$\begin{aligned}PI &= 6.847.500 + 30.000 - (25.800 + 50.000 + 42.700 + 28.000) \\ &= 6.847.500 + 30.000 - 146.500 \\ &= 6.731.000\end{aligned}$$

5. DI/Pendapatan Personal Disposable (*Disposable Income*)

DI adalah total pendapatan yang diterima oleh masyarakat dan sudah siap untuk digunakan dalam konsumsi dan investasi.

Rumus: $DI = PI - \text{Pajak langsung}$ →(5)

Contoh: Pajak pendapatan sebesar Rp166.900, maka jumlah DI adalah:

$$\begin{aligned}DI &= 6.731.000 - 166.900 \\ &= 6.564.100\end{aligned}$$

Tujuan Dan Manfaat Melakukan Perhitungan Pendapatan Nasional

1. Tujuan Menghitung Pendapatan Nasional

- a. Untuk menentukan tingkat kemakmuran suatu Negara.
- b. Untuk sampai pada perkiraan yang tepat dari nilai tahunan barang dan jasa masyarakat
- c. Untuk membantu merencanakan dan melaksanakan program kemajuan jangka panjang.

2. Manfaat dari perhitungan pendapatan nasional

Pada hakikatnya menentukan pembangunan suatu negara, khususnya faktor ekonominya, dapat dilakukan dengan menghitung pendapatan nasionalnya (Hasyim, 2017). Perhitungan ini juga memiliki banyak keuntungan lain, di antaranya sebagai berikut:

- a. Dapat Memahami struktur perekonomian suatu Negara.
Saat menentukan keadaan ekonomi suatu negara, pendapatan nasional dapat menjadi pedoman. Selain itu, model persentase dapat digunakan untuk menulis hasil produksi dan pendapatan.
- b. Dapat memikirkan kondisi ekonomi sesekali antara lokal atau wilayah.
Menganalisis dan membandingkan pendapatan di seluruh wilayah sangat penting. dengan tujuan bersaing untuk kesejahteraan rakyat.
- c. Dapat mengevaluasi situasi ekonomi Negara yang berbeda
Selain mencari cara bekerja dalam ekonomi, membandingkan ekonomi dengan negara lain dan mengetahui di mana peringkat negara juga penting.
- d. Membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi.

Pendapatan nasional perspektif ekonomi islam**Mengenai Ekonomi islam**

Menurut perspektif Islam, manusia berperan sebagai khalifah di dunia ini. Menurut Islam, manusia diperintahkan oleh Allah untuk menggunakan bumi dan seisinya sebagai khalifah, dan mereka wajib melakukannya dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan umat manusia. Islam mencakup semua aspek kehidupan, termasuk hubungan sosial dan praktik ibadah. Ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan hanya dapat dipertahankan melalui ibadah. Selain itu, ibadah berfungsi sebagai pengingat akan tanggung jawab umat manusia sebagai penjaga planet ini. Karena Islam mengakui adanya prinsip tetap (*tsawabit*) dan variabel (*mutaghayyirat*), hubungan sosial dimungkinkan. Prinsip-prinsip tersebut antara lain pelarangan riba, sistem bagi hasil, profit taking, dan pendayagunaan zakat di bidang ekonomi.

Ekonomi Islam, menurut Abdul Mun'in al-Jamal (al-Jamal, 1980), adalah kumpulan fundamental ekonomi umum dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Penerapan syariah dalam kegiatan ekonomi merupakan inti dari ekonomi Islam. Pemahaman ini sangat dapat diterapkan dalam meruntuhkan isu-isu tindakan moneter di mata publik. Ajaran Islam, kebijakan fiskal dan moneter terkait zakat, sistem kredit, dan investasi yang melarang riba, misalnya, mengarahkan kebiasaan konsumsi masyarakat.

Implementasi sistem ekonomi Islam di suatu negara memiliki beberapa tujuan. Pertama, memasukkan hukum Islam ke dalam sistem ekonomi secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena pembangunan masyarakat dipusatkan pada sistem ekonomi Islam yang memberikan masyarakat karakter spiritual dan material. Kedua, mengakhiri keterbelakangan ekonomi negara-negara Muslim dan membebaskan masyarakat Muslim dari ketergantungan mereka pada sistem ekonomi kapitalis Barat dan komunis Timur. Ketiga, untuk melindungi masyarakat dari materialisme dan hedonisme dan untuk mempromosikan nilai-nilai Islam dalam semua usaha ekonomi. Keempat, dalam kerangka risalah Islam, membangun sistem ekonomi yang memupuk solidaritas dan persatuan di antara bangsa-bangsa Muslim. Kelima, tujuan definitif pelaksanaan urusan keuangan Islam adalah untuk mencapai bantuan pemerintah (*falah*) masyarakat secara keseluruhan.

Produk domestik bruto riil suatu negara (GNP) digunakan sebagai ukuran kesejahteraan ekonominya dalam ekonomi konvensional. Ketika GNP meningkat, bantuan pemerintah individu juga meningkat atau sebaliknya, tentu saja, setelah dipisahkan oleh seluruh penduduk (GNP per kapita). Ekonom telah menyuarakan keprihatinan tentang ketidaksempurnaan ukuran kesejahteraan. di antara para ahli keuangan ini, Nordhaus dan Tobin dari Universitas Yale mengusulkan gagasan MEW (Proportion of Monetary Government Assistance), tetapi gagasan ini belum dibuat dan umumnya akan menggunakan gagasan GNP per kapita asli belum lama ini. Beberapa hal yang menunjukkan bahwa GNP kurang siap digunakan sebagai bagian dari bantuan pemerintah di suatu negara adalah sebagai berikut (Huda, et al. 2009):

- a. Perhitungan GNP hanya mencakup barang yang masuk ke pasar, tidak termasuk barang yang diproduksi atau dikonsumsi sendiri. Misalnya, untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari selain beras (di Indonesia), sebagian masyarakat pedesaan di negara berkembang mengkonsumsi sayuran dan tanaman yang ditanam di pekarangan untuk konsumsi sendiri, yang berdampak signifikan terhadap tingkat kesejahteraan mereka.

- b. GNP mengecualikan waktu rekreasi dalam perkiraan, yang membuat perbedaan yang sangat besar. Faktanya adalah bahwa negara-negara maju telah mengingati waktu kerja untuk perkiraan dan mengurangi kali ini. Kesenjangan antara GNP dan kesejahteraan semakin lebar dalam hal ini.
- c. Waktu rekreasi tidak termasuk dalam perkiraan GNP, yang membuat perbedaan yang signifikan. Realitas situasinya adalah membuat negara-negara memiliki energi yang bekerja untuk penilaian dan berkurang kali ini. Dalam hal ini, kesenjangan antara GNP dan kesejahteraan semakin lebar.
- d. Masalah polusi tidak diperhitungkan saat menghitung GNP. Misalnya, banyak pabrik yang justru mencemari lingkungan dengan mencemari air dan udara selama produksi. Akibatnya lingkungan menjadi tercemar, dan masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik terjangkit berbagai penyakit. Karena harus ada biaya pengobatan, hal ini berimbas pada pemotongan kesejahteraan.

Seperti dapat dilihat dari contoh-contoh ini, GNP sulit digunakan sebagai ukuran pendapatan nasional atau untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan suatu negara.

Penggunaan parameter *alah* sebagai tolak ukur merupakan pembeda penting antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi konvensional (Purwanto dan Siswahadi, 2021). *Falah* memiliki komponen spiritual dan kesejahteraan esensial. Dalam Islam, ruh seseorang adalah esensinya. Akibatnya, segala usaha duniawi, termasuk usaha ekonomi, dimaksudkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmani (*jasadiyah*), tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan rohani, karena ruh merupakan hakikat manusia (Huda, dkk. 2009).

Dengan demikian, selain memantapkan komponen-komponen *falah* dalam penguraian bantuan pemerintah, penghitungan gaji masyarakat juga harus memiliki pilihan untuk melihat bagaimana kerjasama instrumen wakaf, zakat dan iuran dalam menggarap bantuan pemerintah dari individu (Sudarsono 2004). Hal ini menunjukkan bahwa keadaan ekonomi makro juga sangat erat kaitannya dengan aspek mikro.

Aspek keuangan Islam perlu menentukan metode yang tepat untuk memperkirakan tingkat bantuan pemerintah moneter dan bantuan pemerintah sosial sehubungan dengan kerangka moral dan sosial Islam (Mannan 1997). Dari sudut pandang sistem ekonomi Islam, ada empat hal yang dapat diukur dengan pendekatan Pendapatan Nasional dalam hal ini (Naf'an, 2014):

1. Distribusi pendapatan rumah tangga individual kini diukur dengan pendapatan nasional
Meskipun dimaksudkan untuk mengukur aktivitas ekonomi pasar, produk nasional bruto (PNB) tidak dapat memberikan penjelasan mengenai komposisi dan distribusi produksi per kapita yang sebenarnya. Padahal, kegiatan produksi yang tidak dilakukan di pasar tidak dapat diidentifikasi oleh GNP. Ini menyiratkan bahwa GNP tidak mencatat kegiatan keluarga yang bermanfaat yang dikonsumsi secara langsung dan tidak dipromosikan. Faktanya, tindakan ini secara signifikan mempengaruhi bantuan pemerintah individu (*discretionary cashflow*). Produksi barang-barang mewah dan produksi kebutuhan pokok dibobotkan sama dalam perhitungan GNP konvensional. Untuk mencapai kemakmuran, kerangka keuangan Islam memberikan solusi sehingga bobot penciptaan kebutuhan pokok lebih berat daripada pengembangan barang dagangan yang boros.

2. Bayaran Publik Menjadi Proporsi Ciptaan di Wilayah Negara

Sulitnya mengukur produksi komoditas subsistem secara akurat harus diakui oleh ilmu ekonomi konvensional. Namun, harus disepakati untuk memasukkan produksi bahan baku subsistem dalam perhitungan GNP. Pekerjaan ini, terutama makanan, sangat penting di negara-negara Islam pertanian karena terkenal dengan pengaturan keuangan dunia. Kita harus terlebih dahulu menentukan tingkat harga yang akan dimanfaatkan sebelum kita dapat menentukan tingkat produksi barang-barang swasembada. Karena kehidupan masyarakat sangat bergantung pada industri ini dan menjadi isu sentral dalam distribusi pendapatan, ketidaktahuan ini jelas merupakan kelemahan yang harus segera dibenahi (Purwanto dan Siswahadi, 2021).

3. Pendapatan Nasional Menjadi Ukuran Kesejahteraan Ekonomi Islam

Permintaan mendasar untuk barang dan jasa harus dinyatakan sebagai persentase dari total konsumsi. Penelitian sang profesor sangat menarik untuk dikaji. William Nordhaus dan James Tobin dari Tindakan Bantuan Pemerintah Keuangan (MEW) dalam Kondisi Moneter Barat. MEW adalah ukuran konsumsi rumah tangga yang berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat ketika GNP mengukur output. Perkiraan MEW didasarkan pada gagasan bahwa kemakmuran rumah tangga adalah bagian terakhir dari ekonomi yang bergantung pada seberapa banyak orang mengkonsumsi. Konsep ini memberikan petunjuk berguna yang dapat digunakan sebagai perkiraan tingkat penghidupan minimum menurut ajaran Islam, meskipun MEW diukur dalam konteks Barat.

4. Pendapatan Nasional Menjadi Ukuran Kesejahteraan Sosial Islam Melalui Nilai Santunan

Untuk tujuan pengambilan keputusan, catatan yang disempurnakan memungkinkan penyelidikan sektor tambahan dan jenis kegiatan sosial. Jika dibandingkan dengan sumbangan yang sering diberikan Islam kepada individu yang membutuhkan, zakat, salah satu pengiriman uang paling signifikan di negara-negara Islam, sebenarnya mudah diperkirakan. Saat ini sedang dicoba untuk menghitung pendapatan Zakat sebagai persentase dari PDB. Sebagai variabel kebijakan, pengukuran ini sangat membantu dalam mengurangi keputusan sosial dan ekonomi terkait kemiskinan.

Sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam :

Perekonomian negara Islam diatur oleh kebijakan-kebijakan yang harus dilaksanakan pemerintah untuk kemaslahatan umat. Menurut Suparmoko (1997), persoalan yang dihadapi adalah kebijakan fiskal yang berkaitan dengan keuangan publik. Menurut Fuad (2010), Islam mendefinisikan manajemen keuangan publik yang baik sebagai proses dimana pemerintah mengumpulkan dan mendistribusikan sumber-sumber pendapatan masyarakat untuk kepentingan masyarakat.

Sejak masa Nabi hingga masa Khulafa ar-Rasyidin, manajemen keuangan publik telah dipraktikkan dalam Islam cukup lama (Karim, 2008). Selama era Nubuwwah, sumber pendapatan negara terpenting adalah ghanimah, atau rampasan perang. Seperlima (khums) dari apa yang diperoleh diberikan kepada pemerintah. Jizyah, infaq, kharraj, dan ushr merupakan sumber pendapatan tambahan pada masa Nabi (Islahi, 1988). Al-diwan didirikan oleh Umar bin Khattab untuk mendirikan Baitul Maal saat ia bertugas. Dia mengelola untuk waktu yang cukup lama dan mewakili area seluas 15 juta kilometer persegi dengan populasi sekitar 62 juta orang (1/3 dari total populasi saat itu) yang saat ini

sebanding dengan 39 negara dan menciptakan 0 mustahiq (Natadipurba 2016). Artinya, pendekatan moneter tidak harus sepenuhnya diselesaikan oleh para ahli (pemerintah) untuk mencapai bantuan sosial pemerintah.

Berikut beberapa sumber pendapatan negara dalam perspektif Ekonomi Islam:

1. *Ghanimah*

Ghanimah berasal dari kata "ghanama", artinya mendapatkan hasil 'rampasan perang'. Harta yang diperoleh tersebut merupakan hasil dari peperangan dengan kaum musyrikin yang tinggal di daerah lain, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak, yaitu tanah, perhiasan, unta, senjata, dll. 1/5 porsi diberikan kepada Allah dan Rasul- Nya, shahabah Rasul, fakir miskin, anak yatim, dan ibnu sabil, 4/5 nya kepada bala tentara yang ikutserta dalam perang, sementara sisanya dihimpun di Baitul Mal untuk didistribusikan (Mardani 2012).

2. *Zakat*

Zakat berasal dari "zaka" yang artinya menumbuhkan. Sedangkan menurut syariah, zakat diartikan sebagai hak yang besarnya sudah ditentukan dan wajib hukumnya untuk dikeluarkan kepada orang-orang yang telah ditentukan pula. Harta yang dimaksud merupakan milik penuh, serta mencapai haul dan nisab (Huda dkk. 2015). Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya meliputi: emas dan perak, binatang ternak (kambing, unta, kerbau, dan sapi), buah-buahan (kurma/anggur), bebijian (jagung, gandum, dan beras), harta perniagaan. Maka, zakat merupakan kewajiban seseorang untuk mengeluarkan sebagian pendapatan atau hartanya untuk didistribusikan kepada rakyat yang membutuhkan (Nasution, Setyanto, dan Huda 2007).

3. *Sedekah*

Sedekah berasal dari "shadaqa" yang artinya benar. Sedekah berbentuk materi yang dikorbankan. Ibn Taimiyah berpendapat bahwa sedekah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atas harta yang dimilikinya (Jauhari 2011). Sedekah dalam pandangan sya'ri merupakan sesuatu yang ma'ruf. Hal ini sesuai dengan hadits riwayat Muslim, "kullu ma'rufin shadaqatun" yang artinya setiap kebaikan adalah sedekah meliputi mencegah maksiat, menafkahi keluarga, dan tersenyum (Purwanti 2020).

4. *Infaq*

Infaq berasal dari kata "anfaqa", artinya mengeluarkan/ mendistribusikan harta untuk keperluan tertentu (Azzam dan Hawwas 2013). Infaq juga dapat diartikan sebagai pengeluaran sebagian harta untuk suatu kepentingan sesuai ajaran Islam (Hafidhudin 1998). Infaq tidak dibatasi nishab, asnaf, dan subjek, artinya bisa dihimpun dari siapa saja serta didistribusikan kepada siapa saja (Mardiantari 2019).

5. *Ushr*

Ushr dapat diartikan sebagai sepersepuluh dari lahan pertanian yang diari dengan air hujan serta sepersepuluh diambil dari barang dagangan yang dibawa pedagang kafir saat memasuki wilayah Islam. Ushr diwajibkan pada hasil nyata yang diperoleh dari tanahnya (Zallum 2009). Harta ushr meliputi hasil pertanian dan perkebunan (buah-

buahan, madu, dll). Sedangkan tanah yang telah diwakafkan dianggap tanah 'ushr bila pemilik telah menanamnya. Hasil pertanian yang dibagikan adalah ketika sudah panen. Porsi yang dikeluarkan sebesar 10% untuk tanah yang diairi oleh sumber air alami (hujan, arus, dsb) dan 5% untuk tanah yang pengairannya menggunakan alat-alat produksi (sumur, alat irigasi, dll) (P. P. dan P. E. I. P3EI 2008).

6. *Jizyah*

Jizyah berasal dari jaza' yang artinya kompensasi. Jizyah dibebankan kepada non muslim karena kekafirannya dan bukan karena hartanya (Zallum 2009). Yang dimaksud adalah orang kaya. Sebagai jaminan orang non-muslim untuk hidup dan tinggal di negara Islam agar memperoleh fasilitas umum layaknya Islam, namun mereka tidak berkewajiban ikut perang membela kaum muslim, kecuali membela negara (Gusfahmi 2007). Nominal jizyah bisa berbeda-beda tiap individu, namun tetap berprinsip pada keadilan.

7. *Kharaj*

Kharaj, yang mengacu pada kontrak atau penyerahan, mengacu pada pajak atas tanah atau hasil dari tanah milik non-Muslim yang telah ditaklukkan dan diambil alih oleh umat Islam. Muslim dan non-Muslim sama-sama berbagi manfaat budidaya (Gusfahmi, 2007). Kharaj dibagi menjadi dua, khususnya bea tetap dan biaya terkait (Karim 2008). Pajak proporsional dikenakan pada sebagian dari total produksi pertanian, sedangkan pajak tetap dikenakan pada tanah selama setahun. Seluruh umat Islam mendapat manfaat dari pembagian kharaj (P.P. and P.E.I.U.Y. P3EI 2008).

8. *Pajak pertambangan*

Pajak pertambangan emas, perak, besi, dll yang terdapat di wilayah Islam. Seperlima dari kekayaan suatu bangsa diserahkan kepada negara untuk mencapai keadilan. Namun, sejauh pemungutan pajak, para peneliti memiliki penilaian alternatif (Lbs 2016).

9. *Wakaf*

Wakaf berarti menahan. Menurut Aziz (2017), wakaf adalah pengalihan hak perorangan atau lembaga secara tetap kepada seseorang atau nadzir wakaf, dan hasilnya digunakan sesuai dengan hukum Islam. Wakaf juga dapat dipahami sebagai aset yang keuntungannya disumbangkan untuk tujuan amal. Harta yang dihibahkan itu sekarang bukan miliknya lagi karena hak-hak pemilikan telah berubah, dengan alasan bahwa harta itu mempunyai tempat di sisi Allah saja yang harus digunakan untuk bantuan pemerintah kepada masyarakat.

Pengeluaran di Negara Islam

Dalam perencanaan keuangan negara, dampak kemampuan negara Islam sangat penting. Sesuai dengan kemampuannya, pendistribusian aset harus mencakup bantuan sosial pemerintah, pendidikan dan ujian, kerangka kerja, pengamanan dan keamanan, dakwah Islam, dan lain-lain. Ada dua karakteristik utama pembelanjaan dalam sistem Islam: pembelanjaan terbatas dan pembelanjaan tak terbatas. Zakat, khumus, dan wakaf hanyalah beberapa contoh penggunaan terbatas di mana pendapatan dapat dialokasikan saat pengeluaran dilakukan. Di pos zakat, harta yang terkumpul hanya boleh dimanfaatkan secara syariah untuk delapan majelis mustahiq yang berhak mendapatkannya. Sementara itu, pengeluaran yang tidak dibatasi disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan.

Tabel Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Islam:

| Penerimaan Jenis Regulasi | Pengeluaran |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Zakat | Kebutuhan dasar |
| Kharaj | Kesejahteraan sosial |
| Jizyah | Pendidikan dan penelitian |
| Ushr | Infrastruktur (fasilitas publik) |
| Jenis sukarela | Dakwah Islam |
| Infak-sedekah | Administrasi negara |
| wakaf | Pertahanan dan keamanan |
| Hadiah-hadiah | - |
| Jenis kondisional | - |
| Khumus | - |
| Pajak (nawaib) | - |
| Keuntungan BUMN | - |
| Dan lain-lain | - |

Terkait dengan seberapa baik negara bekerja, sudah menjadi rahasia umum bahwa pengeluaran publik negara-negara yang menganut ekonomi Islam tidak tetap. Ketiga jenis fungsi negara tersebut tercermin dalam karakteristik belanja publik. Pertama, kemampuan negara dalam memandang syariah yang bersifat long-lasting. Kedua, kemampuan negara didapat dari syariah melalui ijtihad, mengingat keadaan sekitar saat itu. Ketiga, kemampuan untuk tetap mengudara oleh keinginan individu melalui pilihan-pilihan syura dalam situasi dan kondisi tertentu. Pendapatan dan belanja negara harus seimbang dalam anggaran pendapatan dan belanja yang baik. Namun jika gaji tidak sebesar konsumsi maka akan terjadi kekurangan. Di sisi lain, akan ada surplus jika biaya lebih rendah dari pendapatan. Sistem yang dapat digunakan untuk menutupi kekurangan antara lain Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah, dimana contoh-contoh tersebut dapat diatur berdasarkan kemanfaatan dan kerjasama sosial. Demikian juga, pemerintahan yang dijalankan oleh negara Islam juga dapat mengumpulkan aset dengan memberikan jaminan investasi atau ikatan dalam rangka pembagian keuntungan dan kerugian.

Factor-faktor yang mempebgaruhi pendapatan nasional

Dalam menentukan kondisi suatu negara, pendapatan nasional merupakan salah satu metrik pilihan. Permintaan dan penawaran agregat, konsumsi dan tabungan, dan faktor investasi yang berdampak pada pendapatan.

Permintaan dan Penawaran Agregat

Biaya yang akan dikeluarkan oleh perekonomian pada setiap tingkat pekerjaan dikenal sebagai permintaan agregat. Permintaan ditentukan oleh pengeluaran agregat. Biaya perolehan barang dan jasa yang akan digunakan dalam perekonomian selama periode waktu tertentu dikenal sebagai pengeluaran agregat. Sedangkan total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha selama periode waktu tertentu dikenal dengan penawaran agregat (Nilmadesri, 2013: 67)

Harmoni antara total bunga dan total stok akan menentukan pembayaran publik yang dicapai dan tingkat biaya yang dominan. (Sukirno, 2016:102)

Konsumsi dan Tabungan

Secara umum, konsumsi merupakan pemakaian atau perbelanjaan atas barang dan jasa baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mencukupi kebutuhan manusia. (Wiliam, 2007:311) Konsumsi memiliki ikatan yang erat dengan tingkat tabungan, yaitu tabungan menjadi bagian yang tidak dikeluarkan oleh masyarakat. (Persaulian, 2013:4). Perilaku masyarakat dalam konsumsi jika disandingkan dengan pendapatan, yaitu ketika pendapatan yang diperoleh tinggi maka akan semakin tinggi pula konsumsi dan tabungan masyarakat. (Hanum, 2019:87)

Pendapatan nasional memiliki pengaruh atas jumlah uang kuasi Indonesia. Tingkat pendapatan nasional merupakan pengaruh besar dalam menentukan tingkat uang kuasi yang disimpan oleh lembaga keuangan. Ketika pendapatan nasional naik maka jumlah uang kuasi mengalami kenaikan, namun jika pendapatan nasional mengalami penurunan, jumlah uang kuasi menurun pula. (Yuniasih, 2022:7)

Dalam perbedaan relative terhadap pendapatan, jika konsumsi yang dikeluarkan masyarakat mengalami kenaikan maka kecondongan terhadap tabungan masyarakat mengalami penurunan karena dipakai untuk kebutuhan konsumsi. Meskipun tabungan meningkat dalam periode yang sama, persentasenya tetap lebih kecil jika dibandingkan dengan presentase konsumsi yang meningkat. Berbanding terbalik jika konsumsi yang dikeluarkan masyarakat menurun maka tingkat tabungan akan mengalami kenaikan sehingga keterikatan antara konsumsi dengan tabungan adalah hubungan yang berbanding terbalik. (Silvia, 2019:157). dalam penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pendapatan yang akan dibelanjakan dipakai untuk mencukupi kebutuhan hidup, dan sisanya akan ditabung kemudian mengalir ke pemerintah sebagai pendapatan nasional.

Investasi

Investasi atau biasa disebut dengan penanaman modal merupakan pengeluaran penanaman modal perusahaan untuk membeli barang modal dan perlengkapan produksi untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menyediakan barang dan jasa. (Sukirno, 2016:121) Apabila barang dan jasa yang dihasilkan semakin tinggi maka investasi akan semakin tinggi pula. Sebaliknya, apabila barang dan jasa yang dihasilkan rendah, investasi akan semakin rendah pula. Hal ini menunjukkan bahwa investasi menjadi salah satu faktor utama dalam mengukur tingkat pendapatan nasional.

Menurut Teori Keynes pergerakan investasi akan berjalan lurus dengan perubahan yang didapat dalam perekonomian. Investasi menyebabkan masyarakat terus mengalami peningkatan kegiatan ekonomi dan tersedianya lowongan pekerjaan, dengan meningkatnya lapangan pekerjaan akan meningkatkan pendapatan nasional dan tingkat kesejahteraan masyarakat. (Fauziana, 2014: 379)

SIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dari analisis di atas adalah bahwa total pendapatan tahunan suatu negara adalah pendapatan nasionalnya. Indikator seperti Produk Domestik Bruto (PDB) dan Pendapatan Nasional Bruto (GNP), yang mengukur nilai semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam batas negara atau oleh warganya, juga dapat digunakan untuk mengukur pendapatan nasional. Enam (enam) sumber pendapatan ekonomi makro utama suatu negara adalah sebagai berikut: PDB, juga dikenal sebagai Produk Domestik Bruto, NNP, juga dikenal sebagai Produk Nasional Neto, NNI, atau Pendapatan Nasional, dan PI, juga dikenal sebagai Pendapatan Pribadi atau sekali lagi Pembayaran Individu Bersih, DI (Uang ekstra) atau Pembayaran Individu Bersih.

Selain itu, ekonomi Islam memandang pendapatan nasional sebagai salah satu dari empat indikator yang dapat dijadikan tolak ukur kesejahteraan masyarakat. Indikator tersebut meliputi distribusi pendapatan rumah tangga, produksi pedesaan, kesejahteraan masyarakat muslim, dan perhitungan pendapatan nasional sebagai ukuran kesejahteraan sosial ekonomi Islam. Dari sudut pandang ekonomi Islam, ghanimah, zakat, sedekah, infak, ushr, jizyah, kharaj, pajak pertambangan, dan wakaf merupakan sumber pendapatan nasional. Permintaan dan penawaran agregat, konsumsi dan tabungan, dan faktor investasi yang berdampak pada pendapatan.

SARAN

Berdasarkan analisis di atas, terdapat beberapa simpulan yang dapat diambil mengenai pendapatan nasional suatu negara dan peran ekonomi Islam dalam mengukur kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah beberapa saran yang dapat diambil dari simpulan tersebut:

1. Penggunaan indikator ekonomi yang komprehensif penting untuk mengukur pendapatan nasional suatu negara, seperti PDB, NNP, NNI, dan PI. Indikator ini memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kesejahteraan ekonomi masyarakat.
2. Distribusi pendapatan harus diperhatikan agar kesejahteraan sosial dan ekonomi meningkat. Kebijakan yang adil dalam pajak dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat mengurangi kesenjangan pendapatan.
3. Sumber pendapatan Islam seperti zakat, sedekah, infak, dan pajak pertambangan dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pendapatan nasional. Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang memungkinkan pemanfaatan optimal sumber daya ini.
4. Permintaan dan penawaran agregat berpengaruh langsung pada pendapatan nasional. Kebijakan yang mendorong konsumsi, tabungan, dan investasi dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang mendukung pertumbuhan pendapatan.
5. Aspek kesejahteraan sosial-ekonomi, termasuk produksi pedesaan dan kesejahteraan masyarakat Muslim, perlu dipertimbangkan dalam perencanaan kebijakan ekonomi. Pendapatan nasional dapat dijadikan ukuran kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Dengan menggunakan indikator yang tepat, memperhatikan distribusi pendapatan, memanfaatkan sumber pendapatan Islam, mendorong permintaan dan penawaran agregat, serta memperhatikan aspek kesejahteraan sosial-ekonomi, diharapkan dapat tercapai pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Brueckner, M., E. D.-N., & Gradstein, M. (2014, June). National Income and Its Distribution.
- Dumairy, Hadi, S., & Muhammad. (2018, Juli-Desember). MODEL PERHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Jurnal CMES, XI Nomor 2*, 174-186.
- Fauziana, L., Mulyaningsih, A., Anggraeni, E., Y.M, S. C., & Rofida, U. (2014, Juni). KETERKAITAN INVESTASI MODAL TERHADAP GDP INDONESIA. *Economics Development Analysis Journal*, 372-380. Retrieved from <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>
- Firdaus. (2012). ANALISIS PENDAPATAN, PERTUMBUHAN DAN STRUKTUR EKONOMI NASIONAL. *Jurnal Plano Madani, I*, 63-73.
- Irawan, E. (2017). ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ANGGOTA KELOMPOK SADAR WISATA PADA USAHA INDUSTRI KECIL KERAJINAN SOUVENIR DI KOTA MATARAM. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, 2*, 1-10.
- Khilmia, A., & Mustofa. (2022, Juni). Pendapatan Negara Antara Konvensional dan Islam. *18 Nomor 1*, 01-15.
- Kholis, M., Astuti, D., & Febrianti, R. (2016, Maret). HUBUNGAN ANTARA PENDAPATAN NASIONAL DAN INVESTASI DI INDONESIA (Suatu Kajian Ekonomi Makro dengan Model VAR). *Jurnal Organisasi dan Manajemen, 12 Nomor 1*, 65-78.
- Kira, A. R. (2013). The Factors Affecting Gross Domestic Product (GDP) in Developing Countries: The Case of Tanzania. *European Journal of Business and Management, 5 No.4*, 148-158.
- Louhenapessy, D. J., & J Rijoly. (2022, Mei). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19. *Cita Ekonomika: Jurnal Ilmu Ekonomi, 16 (1)*, 18-27. doi:<https://doi.org/10.51125/citaekonomika.v16i1.5350>
- Naqvi, D. I., & Hashim, M. S. (2013, April - Juni). Analyses of the GNP Formula: The Islamic Perspective. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance,, 9 No. 2*, 63-88.
- Purwanto, H., & Siswahadi. (2021, Mei). PARADIGM OF NATIONAL INCOME IN ISLAMIC ECONOMY. *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum, VII No. 01*, 93-101.
- Silviana, F., Adnan, M., & Fithriady. (2022). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI KOTA BANDA ACEH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Journal of Sharia Economics, 3*, 65-82.
- Sugiatni, E. (n.d.). ANALISIS PENDAPATAN NASIONAL DALAM EKONOMI ISLAM. 1-7.

Yoshanda, A. A. (2020). PENDAPATAN NASIONAL.

Yuniarti, Wianti, W., & Nurgaheni, N. E. (n.d.). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam*, 2 (3), 169-176. doi:<https://doi.org/10.36407/serambi.v2i3.207>

Yuniasih, I., Agustina, T., Linggariama, Putra, A. S., & Aisyah, N. (2022, Mei). FACTORS AFFECTING THE AMOUNT OF MONEY CIRCULATING IN INDONESIA. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 1 No 12, 1735-1748.

Hasan, A. & Sahudin, D. (2022). Relevansi Pemikiran Tasawuf Syekh Nawawi Al-Bantani Dengan Ekonomi Islam. *Syifa al-Qulub : Jurnal Studi Psikoterapi Sufistik Vol 7, No 1*, 14-26.